

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan pembangunan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengembangkan daerah yang semakin berat dan kompleks dalam menghadapi era globalisasi untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah secara resmi diperlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 oleh pemerintah pusat. Dengan munculnya otonomi daerah di Indonesia diperlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan mengeratkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saling berhubungan erat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah mampu menjalankan rumah tangganya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan daerah yang dapat diandalkan salah satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai pembangunan daerah.

Peranan pajak daerah menjadi sangat penting dalam pembiayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendanaan daerah dan penyangga utama dalam kegiatan-kegiatan daerahnya. Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar, maka akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan

akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta semakin tinggi kualitas otonominya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada BPS Jawa Tengah tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa pajak daerah pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah terjadi ketimpangan, hal ini berakibat pada pembangunan antar daerah tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016 diperoleh nilai terendah sebesar Rp. 23.587.802,00 juta terjadi pada Kota Magelang Tahun 2016, pajak daerah tertinggi yaitu sebesar Rp. 858764751,00 juta terjadi pada Kota Semarang tahun 2016.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah antar kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami gap yang sangat besar antara kabupaten/kota yang satu dengan yang kabupaten/kota yang lainnya. Pendapatan perkapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu kota ataupun negara, yang diperoleh dari pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dari tahun 2015-2016 menggambarkan bahwa pendapatan penduduk dari berbagai sektor konsumsi selalu meningkat, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) dan Muhammad Tahwin (2013) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penduduk merupakan

salah satu indikator penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional. Jumlah penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Tingkat kepadatan jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah akan berpengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air dan tanah. Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak reklame. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahwin (2013) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penelitian Phany Ineke Putri (2013) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri kecil, menengah, maupun besar yang berbasis agro dan non agro. Jumlah industri akan meramalkan perubahan yang terjadi dalam suatu daerah sehingga industri akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industri di daerah tersebut. Jumlah industri yang meningkat sangat berpengaruh dengan pendapatan pajak itu sendiri, hal ini disebabkan industri yang melakukan kegiatan usaha akan mengurus perijinan, sehingga bertambahnya jumlah industri yang mengurus ijin usaha mengakibatkan penerimaan pajak daerahpun meningkat. Hal tersebut didukung hasil penelitian Arshad Darulmalshah Tamara

(2009) dan Ulfiyah (2015) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Potensi yang dimiliki Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah tergantung pada kesiapan dan potensi yang dimiliki daerah. Disamping itu, peran masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan Pajak Daerah. Banyaknya media yang dapat digunakan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah harus digali secara aktif dan kreatif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis faktor-faktor saja yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah ke dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?
2. Faktor-faktor apa yang paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pemikiran untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya. Manfaat utamanya yaitu yang berhubungan dengan perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadikan sebagai referensi bagi akademisi untuk karya-karya selanjutnya agar bisa lebih inovatif dan kreatif lagi.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, dijelaskan secara rinci yang selanjutnya akan disimpulkan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.